



EMBUN
KALIMASADA

Adhang Adhang Tetese Embun



100 DETIK MENUJU TENGAH MALAM

Akief Alfatih

Alumni S2 International Business & Strategy
Lomonosov Moscow State University

Buletin
Kebudayaan
Embun Kalimasada

Edisi 1 April 2022

Sangkalan:

Pendapat yang disampaikan dalam Buletin Kebudayaan tidak mewakili posisi atau pandangan resmi dari Lembaga Kebudayaan Embun Kalimasada dan Yayasan Badan Wakaf UII. Pendapat yang disampaikan merupakan pendapat pribadi penulis.

Buletin Kebudayaan Embun kalimasada

Edisi 1 April 2022



Hak Cipta dimiliki oleh penulis

Diterbitkan oleh

Lembaga kebudayaan Embun Kalimasada

Yayasan Badan Wakaf UII

Jalan Cik Di Tiro No. 1

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

100 Detik Menuju Tengah Malam

Akief Alfatih

Alumni S2 International Business & Strategy
Lomonosov Moscow State University

Dunia menahan nafas ketika Presiden Rusia Vladimir Vladimirovich Putin menggelar pertemuan terbuka dengan anggota tetap Dewan Keamanan Nasional Rusia pada 22 Februari 2022 di Moskwa. Anggota tetap Dewan Keamanan Nasional Rusia terdiri dari 12 tokoh-tokoh kunci dalam sistem pemerintahan Rusia seperti Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Ketua Duma (Dewan Perwakilan Rakyat Rusia), Direktur Biro Keamanan Federal (FSB) dan Direktur Badan Intelijen Asing (SVR). Pada pertemuan yang disiarkan secara langsung tersebut, seluruh anggota tetap Dewan Keamanan Nasional Rusia hadir dan menyampaikan pendapat mereka satu persatu secara langsung di depan Presiden Putin tentang langkah drastis yang akan diambil oleh Rusia dalam menyikapi isu Ukraina. Setelah mendengar seluruh pendapat anggota, Presiden Vladimir Putin mengumumkan secara resmi bahwa Rusia mengakui kedaulatan 2 negara pecahan Ukraina: Republik Rakyat Luhansk dan Republik Rakyat Donetsk serta memulai "operasi militer spesial" dengan mengirim pasukan darat ke dalam wilayah 2 negara tersebut di atas, dengan kata lain: Perang Rusia – Ukraina secara resmi telah dimulai. Sekali lagi, perang menemukan jalan untuk kembali terjadi di tanah Eropa.

Dalam sejarah peradaban manusia modern, perang total selalu membutuhkan pretext atau dalih yang kuat untuk menjustifikasi langkah militer yang diambil. Dalih ini dibutuhkan untuk mendapatkan justifikasi tidak hanya dalam perspektif hubungan internasional tetapi juga untuk mendapatkan dukungan dari rakyat di dalam negeri. Sebuah narasi perlu dibangun untuk meyakinkan semua orang bahwa sebuah negara melakukan pembunuhan secara terbuka di bawah panji kebenaran. Bahkan, Hitler membutuhkan bangunan narasi ini sebelum memulai perang dunia kedua. Tentu saja narasi antara dua pihak yang saling membunuh akan selalu bertentangan. Ini adalah sifat alami dari perang itu sendiri. Meskipun begitu, sejarah membuktikan bahwa dalih resmi yang digunakan untuk membangun narasi ini seringkali berdiri pada fondasi kertas yang rapuh. Seperti yang terjadi dalam perang Amerika Serikat – Irak dimana Amerika memulai invasi ke Irak dengan menggunakan dalih untuk mengamankan senjata pemusnah massal yang dimiliki oleh Irak. Hingga hari ini, tidak pernah ditemukan bahkan setelah negara kaya akan minyak tersebut porak-poranda di bawah kontrol penuh Amerika dan ratusan ribu orang terbunuh.



Presiden Vladimir Putin. Sumber: wallpaperaccess.com

Perkembangan sistem informasi di era internet ini membuat pembangunan narasi sebagai dalih untuk memulai sebuah perang terbuka menjadi semakin sulit. Hal ini menjadi salah satu alasan kekuatan-kekuatan militer besar dunia lebih memilih melakukan perang proksi ketimbang secara langsung terlibat dalam sebuah perang total. Tekanan baik dari dunia internasional maupun dari dalam negeri menjadi semakin kuat untuk mencegah sebuah negara terlibat perang secara langsung dengan negara berdaulat lainnya. Oleh sebab itu dunia seperti tercengang ketika menyaksikan rudal-rudal Rusia berterbangan di atas langit Ukraina pada 24 Februari 2022. Sebuah tragedi yang sebelumnya hanya bisa dibayangkan terjadi di atas tanah Eropa pada era 90-an.

А Б В Г Д Е
 Ё Ж З И Й К
 Л М Н О П Р
 С Т У Ф Х Ц
 Ч Ш Щ Ъ Ы Ь
 Э Ю Я

Abjad Rusia

Tentara, Iman dan Bahasa

Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina bukanlah hal yang baru saja terjadi. Konflik bersenjata ini telah terjadi setidaknya selama 7 tahun sejak Rusia melakukan aneksasi wilayah Krimea dari Ukraina pada tahun 2014. Meskipun dalam proses aneksasi Krimea tidak ada satu peluru pun yang ditembakkan, ketegangan militer antara kedua negara menjadi sangat tinggi. Kemudian disusul dengan pemisahan diri Luhansk dan Donbas dari Ukraina yang memicu Ukraina melakukan operasi militer yang mereka sebut sebagai operasi anti terorisme di kedua wilayah yang memerdekakan diri tersebut. Rentetan peristiwa yang memicu perang Rusia – Ukraina ini setidaknya dipicu oleh 3 hal yang saling berkelindan: perebutan pengaruh antara NATO dan Rusia, perebutan wilayah antara Rusia dan Ukraina dan persoalan identitas antara bangsa Rus / Rusia (русский, Rusky) dan bangsa Ukraina.

Bangsa dan Negara Ukraina dalam sejarahnya sangat erat dengan peradaban Bangsa dan Negara Rusia. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengakui Peradaban Kievan Rus (Kyivan Rus dalam bahasa Ukraina) sebagai nenek moyang mereka dan dari mana mereka berasal. Kievan Rus yang berasal di Novgorod, salah satu kota di Russia modern, kemudian menjadikan Kiev sebagai ibukotanya selama hampir 4 abad yang hingga hari ini masih menjadi ibukota Negara Ukraina. Kievan Rus juga mewariskan agama Kristen Ortodoks kepada kedua negara ini sehingga menjadi agama mayoritas yang dipeluk oleh warganya. Kedekatan antara 2 saudara satu rumpun ini juga dipererat dengan adanya gerakan pan-Slavisme pada abad ke-19 yang berusaha menyatukan bangsa-bangsa dari rumpun Bangsa Slav dengan romantisme dan nasionalisme Slavia yang ketika itu banyak dikuasai oleh bangsa-bangsa non-Slavic seperti Usmani dan Austria. Tentu saja, akan banyak pertentangan interpretasi sejarah dan catatan kaki yang diperlukan mengingat kompleksitas sejarah kontestasi politik di area Balkan dan Eropa timur.

Kendati berasal dari satu rumpun yang sama dan memiliki banyak kemiripan, Bangsa Ukraina dan Bangsa Rusia adalah 2 entitas etnis yang berbeda. Hal ini secara kasat mata mungkin akan sangat sulit terlihat oleh orang yang tidak memahami bahasa Rusia atau Ukraina, namun bagi orang yang berasal dari kedua etnis ini perbedaan itu sangat dapat dirasakan. Bahasa memegang peranan penting dalam nasionalisme Rusia dimana sejarah mencatat pemaksaan penggunaan bahasa Rusia kepada etnis minoritas adalah bagian dari Russification (Русификация, Rusifikatsiya) yang dilakukan baik oleh Kekaisaran Rusia maupun Bolshevik pada era Uni Soviet. Pemaksaan penggunaan bahasa Rusia ini selalu menjadi poin penting dalam pembicaraan di negara-negara pecahan Uni Soviet termasuk di dalam Negara Rusia modern sendiri. Russification membuat banyak bangsa-bangsa minoritas di Uni Soviet merasa bahwa bangsa Rusia adalah bangsa penjajah yang tidak hanya menguasai wilayah mereka secara fisik, tetapi juga menghapus akar budaya mereka. Negara-negara Baltik bahkan menetapkan hukum yang melarang penggunaan bahasa Rusia dalam administrasi pemerintahan dan pengajaran pendidikan dengan alasan bahasa Rusia adalah bahasa imperialis, meskipun terdapat populasi bangsa Rusia yang cukup besar di negara mereka.

Politik bahasa ini juga menjadi masalah sentral yang memperkeruh perpolitikan Ukraina. Pada tahun 2012 di bawah rezim Presiden Viktor Yanukovich Ukraina menetapkan paket undang-undang kontroversial yang disebut “Kivalov-Kolesnichenko Law” atau biasa juga disebut “Law on the Basis of State Policy”. Undang-undang ini memberikan hak lebih luas kepada masing-masing regional untuk menggunakan bahasa wilayahnya masing-masing dalam sistem administrasi pemerintahan, pendidikan, dan lain-lain. Undang-undang ini tentu saja memberi angin segar kepada Etnis Rusia yang merupakan etnis mayoritas di wilayah timur dan selatan Ukraina. Penetapan undang-undang ini kemudian memicu reaksi keras dari pihak oposisi yang banyak didukung oleh nasionalis Ukraina. Pihak oposisi menuduh peresmian undang-undang ini adalah upaya Rusifikasi baru di Ukraina. Terlebih lagi, latar belakang Presiden Yanukovich yang berasal dari wilayah Donbas dimana penutur Bahasa Rusia merupakan mayoritas membuat perpecahan di kalangan warga Ukraina penutur Bahasa Rusia dan penutur Bahasa Ukraina semakin parah. Tekanan politik di parlemen kemudian merembet menjadi kekerasan jalanan yang menasar etnis Rusia oleh kelompok neo-Nazi yang menamakan diri mereka Azov / Batalion Azov.

Presiden
victor yanukovich



Persekusi terhadap etnis minoritas Rusia terjadi secara sporadis dan terang-terangan dilakukan oleh kelompok nasionalis garis keras ini. Sekedar berbicara menggunakan bahasa Rusia atau memakai St. George Ribbon cukup membuat seseorang menjadi target kekerasan dan dipermalukan di depan umum di Kiev.

Puncak dari perpecahan ini adalah kerusuhan besar berdarah di Kiev yang disebut sebagai “Revolusi Maidan” atau “Revolusi Harga Diri” pada Januari - Februari 2014. Revolusi Maidan ini dipicu oleh keputusan Presiden Yanukovych yang secara tiba-tiba membatalkan penandatanganan perjanjian kerja sama politik dan perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan memilih untuk menerima paket ekonomi yang ditawarkan oleh Rusia demi menjaga kestabilan ekonomi Ukraina yang terancam gagal bayar hutang. Meskipun Presiden Yanukovych mengatakan bahwa Ukraina akan tetap mengejar keanggotaan Uni Eropa, keputusan ini membuat jalan Ukraina untuk menjadi anggota Uni Eropa menjadi semakin sulit. Revolusi yang diawali dengan protes damai di lapangan Maidan ini berubah menjadi kerusuhan berdarah setelah kelompok Azov menyerukan “serangan damai” kepada seluruh anggotanya pada 18 Februari 2014. Akibat dari kerusuhan yang menelan korban ratusan nyawa ini, Parlemen melakukan pembahasan tentang pemakzulan Presiden Yanukovych dari kursi kepresidenan pada 21 Februari 2014. Pada hari itu, juga Presiden Yanukovych meninggalkan Kiev menuju Kharkiv dan kemudian melarikan diri menuju pengasingan di Moskwa. Keesokan harinya parlemen secara resmi melakukan pemakzulan terhadap Presiden Yanukovych dengan suara bulat dan menunjuk ketua parlemen Oleksandr Turchynov sebagai presiden sementara hingga pemilu pada tanggal 25 Mei 2014 yang dikemudian hari dimenangkan oleh Presiden Petro Poroshenko yang dikenal dengan pandangan politik anti-Rusia.

Sentimen anti etnis Rusia di Kiev membuat marah etnis Rusia di wilayah-wilayah yang didominasi oleh etnis Rusia di timur dan selatan. Protes besar-besaran terjadi di wilayah Krimea, Donbass dan Luhansk. Para demonstran mengibarkan bendera Negara Rusia dan menyampaikan keinginan mereka untuk bergabung dengan Negara Federal Rusia di jalan-jalan. Hanya dalam hitungan hari, tentara Rusia tanpa rencana dan kredensial militer merangsek masuk dan menduduki pangkalan-pangkalan militer Ukraina di Krimea, termasuk pangkalan militer penting di Sevastopol. Pada 16 Maret 2014, referendum dilakukan dan hasilnya 97% warga Krimea memilih untuk memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Negara Federal Rusia dengan angka partisipasi 83% pemilih. Secara resmi, Krimea menjadi bagian dari Negara Rusia tanpa satu peluru pun ditembakkan.

Efek domino dari keberhasilan pemisahan diri Krimea dari Ukraina segera menjalar ke wilayah-wilayah Ukraina yang didominasi etnis Rusia lain. Warga Luhansk dan Donetsk menduduki kantor-kantor pemerintahan Ukraina di kota mereka dan menuntut Kiev untuk menggelar referendum di 2 wilayah di timur Ukraina tersebut. Berbeda dengan apa yang terjadi di Crimea, Kiev justru merespon tuntutan referendum di 2 wilayah ini dengan menggelar “operasi militer anti-terorisme” dan mengerahkan pasukan bersenjata.

Operasi militer inilah yang kemudian menjadi awal dari perang panjang antara Ukraina dengan Republik Rakyat Luhansk dan Republik Rakyat Donetsk yang didukung oleh Rusia.

Presiden terpilih Petro Poroshenko berusaha untuk merangkul kembali warga Ukraina etnis Rusia dengan mengatakan upaya parlemen untuk melakukan penghapusan Kivalov-Kolesnichenko Law segera setelah maidan adalah sebuah kesalahan. Presiden yang baru terpilih ini bahkan memberikan pidato khusus kepada rakyat Luhansk dan Donetsk dengan menggunakan bahasa Rusia dengan maksud untuk meredakan gerakan separatisme disana. Namun upaya ini tidak berhasil meluluhkan hati rakyat Luhansk dan Donetsk yang sudah terlanjur mendeklarasikan kemerdekaannya. Upaya ini justru menjadi bumerang bagi Presiden Poroshenko. Ia mendapatkan reaksi keras dari parlemen yang dikuasai oleh kelompok nasionalis garis keras yang terus berusaha untuk menghapus Kivalov-Kolesnichenko Law dan menggantinya dengan draf undang-undang 5670-D yang menekankan penggunaan bahasa Ukraina sebagai satu-satunya bahasa nasional yang dipakai di Ukraina.

Perang berkepanjangan dengan Donetsk dan Luhansk serta semakin kuatnya pengaruh nasionalis garis keras di Kiev membuat sikap politik Presiden Poroshenko terhadap bahasa Rusia berubah pada kampanye pemilu berikutnya. Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Poroshenko memosisikan diri sebagai seorang patriot untuk mendekati diri kepada kaum nasionalis Ukraina yang secara alami selalu mudah mendapatkan simpati dalam instabilitas politik. Slogan “Tentara! Iman! Bahasa!” jelas mengirimkan pesan nasionalistik ini kepada para pemilih. Rezim Presiden Poroshenko di akhir masa jabatannya menerima Draf UU 5670-D dan akhirnya lolos menjadi UU yang berlaku. Meskipun UU ini tidak berhasil menyelamatkannya di dalam bilik suara, namun penetapan UU ini memperburuk persatuan Ukraina yang sudah dalam kondisi sangat buruk. Kaum nasionalis garis keras yang menguasai parlemen bahkan meneriaki Presiden Zelensky yang menyampaikan pidato inagurasinya menggunakan bahasa Rusia.

Meskipun latar belakang dalam pembuatan UU 5670-D utamanya adalah untuk melawan apa yang dituduhkan sebagai Rusifikasi, dampak dari berlakunya UU ini juga turut memarjinalkan bahasa etnis minoritas Ukraina yang lain seperti Tatar dan Hungaria. Penetapan undang-undang yang kental dengan aroma fasisme seperti ini bukanlah sesuatu yang bijak untuk mempersatukan kembali sebuah negara multietnis yang sedang dilanda perpecahan teritorial seperti Ukraina. Justru UU ini menjadi kontra produktif karena memberikan kesadaran identitas yang jelas tentang semangat kebangsaan warga etnis Rusia serta mengaburkan batas teritorial negara Etnis minoritas di Ukraina dihadapkan pada persoalan identitas baru dimana mereka harus menentukan posisi kesadaran kebangsaan baru dengan hanya 2 pilihan: Bangsa Ukraina atau bukan bangsa Ukraina.



Presiden
Petro Poroshenko



Presiden
Volodymyr Zelensky

Menjadi warga negara Ukraina yang terikat dengan UU 5670-D ini mempersempit kesempatan koeksistensi multikultur di dalam negara Ukraina. Pada akhirnya Ukraina seperti mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Uni Soviet dengan Rusifikasi. Sesuatu yang sangat disayangkan dapat terjadi di era modern.

Dalam panggung politik internasional UU 5670-D juga mempersulit posisi Ukraina, terutama dalam upaya diplomasi dengan negara-negara barat dan Uni Eropa yang menjunjung tinggi nilai-nilai multikultural. Menteri luar negeri Hungaria, Péter Szijjártó bahkan secara terbuka menyebut UU ini sebagai “sesuatu yang tidak bisa diterima”. Meskipun pada perkembangannya Ukraina melakukan beberapa kompromi dengan bahasa-bahasa lain, terutama bahasa-bahasa negara Uni Eropa, kesan buruk yang terlanjur tersampaikan dari Kiev bersama penetapan UU ini akan sangat sulit untuk dilupakan oleh warga etnis minoritas di Ukraina. Apalagi bahasa Rusia yang berada dalam pusaran masalah perpecahan dan secara aktif dan luas dituturkan di Ukraina justru tidak diakomodasi dalam kompromi-kompromi yang dilakukan. Berlakunya UU ini justru seolah memberikan Rusia angin untuk semakin mudah mendapat simpati rakyat Donetsk dan Luhansk. Presiden Putin menanggapi marjinalisasi bahasa Rusia di Ukraina ini dengan mengatakan bahwa “Kiev seperti melupakan sejarah”. Tidak hanya itu, Presiden Putin juga menggunakan marjinalisasi bahasa ini sebagai peluru diplomasi dalam menghadapi pengaruh NATO di Ukraina. Ia menggunakan nasionalisme Rusia sebagai peluru justifikasi tindakan militer dengan mengatakan bahwa “Militer Rusia bisa saja bergerak jika Ukraina membunuh bangsa Rusia di Luhansk dan Donetsk”. Sebuah pernyataan yang kuat mengingat pada saat ia mengatakannya sebelum Rusia mengakui kedaulatan negara Republik Rakyat Luhansk dan Republik Rakyat Donetsk. Dalih ini pun digunakan oleh Rusia dengan menamai perang Rusia – Ukraina ini sebagai “operasi militer spesial untuk denazifikasi dan demiliterisasi Ukraina”. Meskipun semua orang yang sedikit saja membaca buku pasti tahu jika perang ini bukan hanya soal itu.

“the streets of Leningrad taught me one thing: If a fight's inevitable, throw the first punch”
-Vladimir Vladimirovich Putin-

Diplomasi Zelensky dan jam tangan Putin

Perang Dingin memang telah lama berakhir dengan kemenangan Barat dan runtuhnya Uni Soviet, namun NATO dan Rusia hingga hari ini masih saling menjaga “keseimbangan” antara keduanya dengan saling menodongkan senjata ke leher masing-masing. Konsep keseimbangan antara NATO dan Rusia inilah yang menurut Presiden Putin menjaga perdamaian di dunia dan mencegah perang nuklir terjadi. Dalam banyak kesempatan, ia mengatakan bahwa jika keseimbangan ini rusak, maka perang antara NATO dan Rusia bisa terjadi dan tidak akan ada pemenang dalam perang tersebut. Presiden Putin yang memiliki latar belakang sebagai mata-mata KGB di era Perang Dingin memahami betul akan hal ini. Terlebih, ia adalah mata-mata yang ditugaskan di Berlin, salah satu garis depan yang paling berbahaya bagi seorang mata-mata KGB. Tidak heran jika dia sangat marah saat NATO berkali-kali ingkar terhadap janjinya untuk tidak melakukan ekspansi ke timur. Ia memahami betul betapa berbahaya hal ini bagi Rusia jika hal ini terus dibiarkan.

Sementara itu Ukraina berkeinginan kuat untuk masuk menjadi negara anggota NATO. Ukraina bahkan menuliskan keinginan ini ke dalam konstitusi negaranya. Keinginan kuat Ukraina untuk bergabung dengan NATO ini tentu saja meresahkan Presiden Putin. Terlebih lagi Ukraina sedang berperang dengan separatist Donetsk & Luhansk yang merupakan proxy dari Rusia. Jika Ukraina resmi menjadi negara anggota NATO dan memutuskan untuk mengambil kembali Crimea secara militer maka perang dunia ketiga tidak terhindarkan. Perang yang tidak ada seorang pun menginginkannya. Letak geografis Ukraina yang sangat dekat dengan Moskva menjadikan posisi pertahanan strategis Rusia menjadi sangat lemah mengingat NATO dapat menempatkan infrastruktur militernya di wilayah semua negara anggota NATO. Jika Amerika Serikat menempatkan rudal balistiknya di wilayah Ukraina, maka waktu reaksi untuk serangan nuklir ke tembok Kremlin akan menjadi kurang dari 5 menit saja.

Rusia berkali-kali melakukan protes keras terhadap kemungkinan bergabungnya Ukraina kedalam aliansi NATO, namun protes keras ini seperti tidak diindahkan oleh Presiden Zelensky. Presiden Zelensky justru menggunakan bahasa diplomasi yang keras untuk menanggapi protes dari Rusia. Dalam pidato awal tahunnya ia bahkan berjanji akan merebut kembali wilayah Luhansk dan Donetsk pada tahun 2022. Zelensky yang merupakan seorang komedian sebelum mencalonkan diri sebagai presiden memang dikenal sering menggunakan bahasa politik yang tegas. Salah satu kalimatnya yang paling terkenal dan mengantarkannya duduk di atas kursi kepresidenan adalah ketika dalam debat ia mengatakan kepada lawan politiknya yang merupakan petahana, Presiden Poroshenko, bahwa “Saya bukanlah lawan Anda, saya adalah vonis bagi Anda”. Bahasa politik yang keras dan menawan seperti ini memang seringkali efektif membuat pemilih dalam pemilu terkesima. Itulah mengapa dalam sejarah banyak demagog menggunakan gaya bahasa yang sama meskipun rasionalisasi dan realisasinya jauh panggang dari api.

Sayangnya Presiden Zelensky menggunakan gaya bahasa yang sama dalam kancah politik internasional yang sifat alamnya jauh berbeda dengan politik domestik. Dalam diplomasi internasional, bahasa diplomatik yang membosankan namun rasional justru akan lebih efektif untuk digunakan karena tujuan diplomasi bukanlah untuk mendapatkan simpati pemilih melainkan mencapai tujuan-tujuan strategis yang rasional. Penggunaan bahasa ala koboi justru akan mempersulit proses diplomasi dibalik pintu tertutup karena lawan bicara yang dihadapi bukanlah massa mengambang melainkan pemimpin politik dan diplomat kawakan dari negara lain.

Diplomasi internasional Ukraina dibawah rezim Presiden Zelensky yang belum berpengalaman diperburuk dengan dikelilinginya Zelensky oleh orang-orang yang juga masih “merah” dalam politik internasional. Sebagai contoh yang paling terlihat adalah ditunjuknya diplomat senior yang masih sangat muda Dmytro Kuleba sebagai menteri luar negeri Ukraina pada awal 2020. Dalam berbagai kesempatan jelas terlihat bagaimana terbatasnya kosa kata dari Kuleba dalam menanggapi berbagai isu krusial di Ukraina. Hal ini terjadi karena terbatasnya pilihan Presiden Zelensky yang dalam kampanyenya memposisikan diri sebagai calon presiden diluar lingkaran kekuasaan oligarki yang selama ini mencengkeram Ukraina. Di lain sisi tekanan dari parlemen dan kekuatan politik defacto dari oligarki dan nasionalis garis keras tidak bisa begitu saja disingkirkan dari lingkaran pemerintahan Ukraina oleh rezim Zelensky.

Salah satu contoh dari gagalnya Presiden Zelensky untuk melakukan konsolidasi internal dalam rezim pemerintahannya sehingga membuatnya terpaksa harus melakukan kompromi dengan rezim Poroshenko adalah ditunjuknya Alexey Arestovyc sebagai salah satu penasihat kepresidenan dalam rezim Zelensky. Arestovyc yang dikenal sebagai think tank dari rezim sebelumnya dan tangan kanan dari Presiden Poroshenko adalah salah satu orang yang Presiden Zelensky berjanji akan memenjarakannya bersama dengan Presiden Poroshenko jika ia menjabat sebagai presiden justru kembali masuk dalam lingkaran terdalam kepresidenan Zelensky. Arestovyc adalah orang yang secara terang-terangan memilih Ukraina untuk melakukan perang terbuka dengan Rusia demi masuk ke dalam NATO dan merebut kembali Luhansk, Donetsk dan Crimea secara militer ketimbang harus menjadi negara netral dengan alasan menjadi negara netral terlalu mahal untuk Ukraina dan Ukraina tidak akan mampu membayarnya. Suara dari Arestovyc ini seperti digaungkan oleh Presiden Zelensky dengan berbagai provokasi-provokasi kepada Rusia. Salah satunya adalah pernyataan Presiden Zelensky yang mengatakan bahwa ia tidak menyukai satu butir pun isi dari perjanjian Minsk dan ingin merobek-robek perjanjian tersebut. Perjanjian Minsk adalah perjanjian tri-lateral antara Ukraina, Rusia & Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) yang dimediasi oleh Perancis dan Jerman dalam apa yang dinamakan Normandy Format.

Perjanjian inilah yang menjadi fondasi utama berhentinya perang brutal di Luhansk dan Donetsk dan menyeretnya menjadi perang parit ala perang dunia ke-1 selama 7 tahun sejak 5 September 2014. Meskipun tidak menghentikan perang, Perjanjian Minsk memungkinkan gencatan senjata atau setidaknya perang dengan korban yang jauh lebih sedikit dan dimungkinkannya pemulihan stabilitas kehidupan masyarakat di Donetsk dan Luhansk.

Dalam krisis Ukraina ini, menjadi menarik ketika kita mencermati dinamika politik yang terjadi dari dan di dalam NATO. Amerika Serikat, Inggris, Polandia, negara2 dan negara-negara baltik secara aktif melakukan agitasi terhadap provokasi Ukraina. Negara-negara tersebut terus memberikan bantuan persenjataan militer kepada Ukraina. Salah satunya adalah suplai ATGM Javelin yang merupakan salah satu senjata kunci untuk melawan doktrin perang Rusia di Eropa timur yang mengandalkan tank dan artileri pada tanah datar Ukraina yang luas. Mereka sama sekali tidak mengindahkan protes keras Rusia dengan dalih NATO tidak bernegosiasi dibawah todongan senjata (merujuk pada 150.000 pasukan Rusia yang ada di perbatasan Ukraina). Namun Jerman dan Perancis terlihat sedikit enggan untuk mendukung sikap provokatif Ukraina. Melihat dari perspektif Jerman dan Perancis ini adalah langkah rasional untuk kepentingan negaranya masing-masing. Jika skala konflik meningkat, bagaimanapun bentuknya, Jerman dan Perancis akan menjadi medan perang utama. Jika konflik meningkat menjadi perang dunia ke-3 maka rudal-rudal Rusia akan jatuh di Berlin dan Paris terlebih dahulu sebelum mencapai London dan Washington. Jika konflik meningkat menjadi perang ekonomi, merekalah yang akan menanggung collateral damage ekonomi paling parah ketimbang AS dan UK.

Pada kenyataannya Uni Eropa memiliki ketergantungan energi kepada tambang gas Gazprom di Siberia, Rusia. Belum lagi mega proyek NordStream 2 yang sudah dalam tahap akhir penyelesaian akan menjadi sunk cost yang tidak terhindarkan dan memukul Jerman sebagai inisiator utamanya lebih keras ketimbang apa yang akan dirasakan Rusia yang sebagian besarnya hanyalah opportunity lost. Di lain pihak, AS justru akan mendapatkan kesempatan untuk "memaksa" Uni Eropa membeli produksi LNG-nya dengan harga yang lebih tinggi. Bagi AS apapun yang akan terjadi di Ukraina adalah kemenangan strategi diplomasi bagi mereka. Jika Ukraina berhasil masuk menjadi negara anggota NATO maka AS akan mendapatkan keuntungan pertahanan strategis untuk mengimbangi ketertinggalan mereka dalam pengembangan rudal hypersonic sejak Rusia mengumumkan beroperasinya rudal Kh-47M2 "Khinzal" yang merupakan mimpi terburuk AS sejak RS-28 "Sarmat" dengan NATO codename "Satan-2". Sedangkan, jika Ukraina berperang melawan Rusia, maka AS akan berhasil merevitalisasi NATO yang pada 2019 mendapatkan kritik keras dari Presiden Perancis, Emanuel Macron.

Macron menyebut NATO sedang mengalami "Brain Dead" karena merasa Perancis dan Negara Uni Eropa lainnya tidak bisa menentukan nasib mereka sendiri. Bagi Inggris, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih tinggi dalam negosiasi-negosiasi menghadapi Uni Eropa di masa depan. Bagi Polandia dan negara-negara Baaaltik, masuknya Ukraina ke dalam NATO akan menjadi tembok militer baru yang melapisi atau bahkan menggantikan posisi mereka sebelumnya. Negara-negara Balkan cenderung lebih banyak bersikap netral karena tidak ingin mengambil resiko yang tidak perlu. Lalu bagaimana dengan Turki yang memiliki posisi sangat strategis di Laut Hitam dan Selat Bosporus? Well, Turkey does what Turkey does, bermain 2 kaki menjadi "jembatan" antara timur dan barat sembari memperkuat pengaruhnya ke semua pihak.

Sayangnya, Presiden Zelensky gagal memahami posisinya dan terjebak dalam delusion of grandeur akan posisi realistis dirinya dan Ukraina di atas papan catur politik internasional. Ia terjebak oleh agitasi NATO dan betul-betul percaya bahwa pintu benar terbuka dan NATO akan secara langsung membantunya dalam perang terbuka menghadapi Rusia. Dia terus menunjukkan "keberanian dan kegagahan" tanpa menyadari bahwa dirinya dan Ukraina yang dicintainya hanyalah pion kecil dalam permainan. Sebuah "pepesan kosong" dari barat yang baru ia sadari ketika kesabaran Presiden Putin telah habis dan melepas jam tangannya di Kremlin pada 21 Februari 2022, menandakan waktu bicara telah usai. Presiden Zelensky mungkin kecewa, ia melakukan unfollow semua pemimpin NATO di Twitter sembari mengatakan bahwa dari seluruh pemimpin negara NATO yang dihubungi tidak ada satupun yang bersedia mengirimkan pasukan ke Ukraina. Tetapi rakyat dan tentara Ukraina-lah yang mesti merentang nyawa oleh rudal-rudal Iskander-M Rusia yang menghujani Ukraina pada 24 Februari 2022, demi membayar ambisinya.

Umat manusia seperti tidak belajar pada sejarah. Orang yang menginginkan perang tidak bertempur dalam peperangan dan orang yang bertempur dalam peperangan tidak menginginkan perang. Semoga pemimpin-pemimpin muda dunia yang akan mewarisi sinar matahari yang sama bisa terus bertahan memakai jam tangannya masing-masing dan menghindari pertumpahan darah selamanya.

худой мир лучше доброй ссоры
a bad peace is better than a good quarrel





EMBUN KALIMASADA

Adhang Adhang Tetese Embun

Lembaga kebudayaan Embun Kalimasada
Yayasan Badan Wakaf Ull
Jalan Cik Di Tiro No. 1